

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI
PENGATURAN HAK-HAK PEREMPUAN UNTUAK MEMILIH DAN DIPILIH PADA
PEMILIHAN UMUM DALAM *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW)*, SYARIAH ISLAM DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

UNIVERSITAS ANDALAS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1

Disusun Oleh:

**HERFANDRO FAZAR ALS FANDO
0910112065**

**Pembimbing : Dr. Mardenis.SH.,M.Si
M. Jhon.SH.,M.H**

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PKVII)




UNTUK

KED

AN

BANGSA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2016**

	No. Alumni Fakultas :	Herfandro Fazar als Fando	No. Alumni Universitas:
	a) Tempat/tgl lahir: Pariaman, 15 September 1991 b) Nama Orang tua: Farizal c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VII) e) No.Bp: 0910112065	f) Tanggal Lulus: 27 Juli 2016 g) IPK: 3,07 j) Predikat Lulus: Memuaskan k) Lama Studi: 6 Tahun 11 Bulan	

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK



STUDI KOMPARASI PENGATURAN HAK-HAK PEREMPUAN UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH PADA PEMILIHAN UMUM DALAM *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)*, SYARIAH ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

(Herfandro Fazar Als Fando, 0910112065. 63 hlm+vii. Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2016)

Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disingkat CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di dalam Pasal 7 nya memuat ketentuan tentang hak-hak perempuan untuk memilih dan dipilih. Dengan diratifikasinya CEDAW ini maka Indonesia harus menerapkan aturan yang sama sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam CEDAW pada Pasal 7 ini. Sesuai dengan prinsip dasar hukum internasional *Pacta Sunt Servanda* dimana perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai negara yang warga negaranya memiliki jumlah penduduk beragama Islam lebih banyak dibandingkan agama lain, Indonesia juga dipengaruhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah secara individu yang ingin menjalankan Syariah Islam. CEDAW dan Syariah Islam sama-sama memiliki ketentuan yang mengatur khusus akan hak-hak perempuan untuk memilih dan dipilih. Dilihat dari persamaan dan perbedaan yang mungkin terjadi bisa mempengaruhi terhadap penerapannya dalam hukum nasional Indonesia. Karena Syariah Islam memberikan pengaruh terhadap penerapan ketentuan dalam CEDAW dalam hukum nasional Indonesia maka studi komparasi pengaturan hak-hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam CEDAW, Syariah Islam dan implementasinya dalam hukum nasional Indonesia menarik untuk diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian, CEDAW dan Syariah Islam sama-sama memberikan hak kepada perempuan untuk bisa memilih dan berbeda ketentuannya dalam hak untuk dipilih. CEDAW memberikan hak sebebaskan kepada perempuan untuk dipilih sedangkan Syariah Islam membatasi perempuan untuk bisa dipilih dan melarang sepenuhnya perempuan dipilih menjadi pemimpin negara. Dalam hal penerapan pengaturan hak-hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam hukum nasional Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Partai Politik.

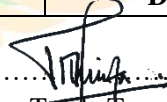
Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.		2.	
Nama Terang		Hj. Magdariza, SH., MH		Dayu Medina, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian : **Hj. Magdariza, SH., MH**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama
No. Alumni Universitas	Nama



Alumni Faculty Number:

Herfandro Fazar als Fando

Alumni University Number:

a) Date of Birth: Pariaman, 15 September 1991	f) Graduation Date: 27 Juli 2016
Name of Parent: Farizal dan Zarnita	g) IPK: 3,07
Faculty of Law	h) Predicate Graduated: Memuaskan
Concentrate: Hukum Internasional (PK VII)	i) Duration of Study: 6 Years 11 Mounths
No.Bp: 0910112065	

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE ARRANGEMENTS OF WOMEN'S RIGHTS TO VOTE AND BE ELECTED IN THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW), ISLAMIC SHARIA AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIAN NATIONAL LAW

(Herfandro Fazar Als Fando, 0910112065. 63 hlm+vii. International Law, Faculty of Law Andalas University. 2016)

Indonesia as a member of United Nations has ratified the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (here in after referred to as CEDAW) by Act No. 7 of 1984. In its Article 7 contains provisions on women's rights to vote and be elected. With the ratification of CEDAW, Indonesia should apply the same rules in accordance with the provisions contained in Article 7 of CEDAW. In accordance with the basic principles of international law *Pacta Sunt Servanda* where the formed agreements is counted as an act for the parties who made it. As a country with large amount of Muslim population, Indonesia also got influenced both by society and government individually who want to run the Islamic Sharia. CEDAW and Islamic Sharia have the same particular provisions arranging the rights of women to vote and be elected. Judging from the similarities and differences that may occur can affect the application in the Indonesian national law. Because the Islamic Sharia is giving an influence for the application of the provisions of CEDAW in Indonesian national law, then a comparative study of women's rights to vote and be elected in the CEDAW, the Islamic Sharia and its implementation in Indonesian national law is interesting to be done by a research with normative juridical approach. After doing the research, CEDAW and Islamic Sharia are equally entitles women to vote and vary its terms in the right to be elected. CEDAW gives rights to women to be elected at large while Islamic Sharia confined women to get elected and a complete ban for women to become the heads of a state. In terms of implementation of the arrangements of women's rights to vote and be elected in the Indonesian national law, it is regulated by Act No. 39 of 1999 on Human Rights, Act No. 8 of 2012 on General Elections, and Act No. 2 of 2012 on Political Parties.

This thesis was defended in front of examiners on passed on July 27, 2016.
Abstract has been appoved by the testers.

Examiner,

Signature	1.	2.
Name	Hj. Magdariza, SH., MH	Dayu Medina, SH., MH

Knowing,
Head of the Internasional Law: Hj. Magdariza, SH., MH

Signature

Alumnus have signed up to the Faculty/University alumnus and got numbers :

	Petugas Fakultas/ Universitas
Alumni Faculty Number:	Name:
Alumni University Number:	Name: